

Tindak Lanjut PPA:
**KONSULTASI PUBLIK “MASA DEPAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN
KAPUAS HULU 2030”**

*Yayan Indriatmoko, Bayuni Shantiko, Valentinus Herry
Putussibau, 30 April 2012*



**Collaborative Land Use Planning and Sustainable
Institutional Arrangements for Strengthening Land
Tenure, Forest and Community Rights in Indonesia
(CoLUPSIA)**



Summary

1. Introduction

PPA public consultation meeting was conducted as a continuation of PPA workshop held in 2011. Following this, public consultation at kecamatan level was conducted in November 2011. The purpose of the public consultation were first, to inform stakeholders on the result of PPA workshop i.e. future scenario of development in Kapuas Hulu district by 2030. Second, to gather input, feedback and to identify other important consideration which have not been included in the scenario, and third, to address common issues and develop action plan agreed by all stakeholders.

The meeting was attended by about 35 participants coming from various stakeholders that is subdistrict representatives; district agencies/Dinas among others from education, district development planning, fishery, tourism, public works; national park; local community and legislative. The meeting was composed by mostly male and few female from respective organizations.

2. The Process

Public consultation was opened by head of district development planning agency and following this he gave presentation on overview of development in Kapuas Hulu from planning to the application. He stressed the fact that the district has been designated two national parks which comprises area of 51% (including protected areas) of the district area, therefore the area for development becoming limited. At the same time Kapuas Hulu is positioned as front veranda of Indonesia but lack of infrastructure access such as transportation, health and education. Not surprisingly the HDI level was the 8th of the west kalimantan province.

The district directs its development focus on ecotourism in order to optimize the use of natural beauty and landscape as well as the district has committed to pursue development model aligned with conservation. Tourism has been underdeveloped in Kapuas Hulu therefore it needs big effort and collaboration among stakeholders to achieve the goal.

Project CoLUPSIA delivered presentation on project progress and information and followed by presenting the result of scenario from PPA workshop. The session was followed by group work to discuss 4 scenarios and agree the desired one. Participants were also asked to discuss on what steps to be taken and by whom.

3. Discussion/issues

- Desired scenario 1, langkah serampak

Having 4 scenarios, participants tend to select scenario 1 as a desired future. Some participant were pessimist that scenario 1 could happened in the future, while some of them admit that scenario 1 happened at local and micro scale such as hamlet, RT/RW. On the other hand,

participant also disagree whether scenario 2,3,4 were scenario/not since few of them argue that these scenario have already happened.

For instance the water access in the area near plantation (mention case in Silat Hulu) was very bad and most of population have to buy clean water for domestic use. Such (social) costs in fact never calculated properly in any development project, even worst in AMDAL. If the local government should pay the (social) cost then it will far exceed the district budget.

- Scenario follow ups

During group work there were several ideas that could be useful for the project in order to respond along the project time frame.

- Colupsia time period up to 2030 (monitoring issue)

Participants realized the importance of the scenario of development in Kapuas Hulu, but also they realized that many plan have been developed but differ in implementation phase because of many factors. Few of them are change of local political situation and lack of leadership and commitment. Therefore, participants suggest periodic monitoring done by Bappeda or Bawasda and also expect CoLUPSIA is able to conduct such monitoring and suggest to extend the life of project until 2030.

- Integration into district policy (through APBD, public seminar, etc)

Legislative participant saw the process gave benefit to local government in general, therefore he urge that PPA result can be integrated into district policy through APBD and public seminar to disseminate information on the scenario.

- Micro planning (e.g. ecotourism, commodity development, water use etc)

The participants also realized that scenario was macro approach to development agenda. It needs more detail and specific in order to answer particular issue at local level. There is an idea of commodity development which suitable with Kapuas Hulu condition. Other ideas is to develop planning for particular aspect such as ecotourism and water use. This processes are expected to be facilitated by CoLUPSIA.

- Social cost

Social cost has been generated warm discussion along the workshop. One participants came from palm oil plantation exposed the positive side of investment to local development such as road infrastructure etc. While local official (one of them from Bappeda) argued the positive impact but also revealed the negative impacts have been far exceed the positive one.

- Rancang ulang peruntukan lahan

This idea is interesting to be follow up, as it is contrary to common perception that local government reject the idea of land use revision. However the participant who raise the issue, in fact, from Bappeda but not from the section in charged (fisik prasarana) for spatial plan.

Rekaman proses

Lokakarya ini merupakan bagian dari proses penyusunan skenario pembangunan Kapuas Hulu dengan metode PPA, Colupsia project



Waktu: 30 April 2012

Tempat: Aula Kantor Bappeda, Kapuas Hulu

Facilitator:

Yayan Indriatmoko/CIFOR

Bayuni Shantiko/CIFOR

Valentinus Herry/Yayasan Riak Bumi

Hasil Lokakarya

Lokakarya dibuka oleh Pak Suparman (Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu).

Kepala Bappeda juga memberikan presentasi tentang kondisi Kapuas Hulu sekarang terkait dengan perencanaan pembangunan.

Beberapa hal yang penting yang dipresentasikan Kepala Bappeda diantaranya:

1. Perencanaan pembangunan mengacu pada undang-undang yang sudah ada
2. Perencanaan pembangunan sebuah proses politik (lobby, negosiasi), semakin banyak partai politik sekarang semakin sulit membuat perencanaan pembangunan, prosesnya alot.
3. Ada RPJN (Rencana Pembangunan Nasional) yang menjadi acuan daerah
4. Ada Rencana kerka daerah (semenjak dari proses Pilkada), calon pimpinan daerah membuat Visi dan Misi pembangunan sendiri untuk 5 tahun ke depan jika ia terpilih
5. Tugas Bappeda lebih kepada memproses rancangan awal, perencanaan pembangunan jangka menengah 5 tahun tersebut melalui Musrenbang, RPJM, kemudian diturunkan menjadi Renstra SKPD, kemudian dijabarkan ke dalam penyusunan platform anggaran sementara
6. Jadi APBD merupakan keputusan politik
7. Bagaimana 20 tahun ke depan di Kapuas Hulu? Terkait dengan proyek Colupsia, 20 tahun itu terlalu pendek kalau tujuannya kesejahteraan masyarakat karena situasi system perpolitikan dengan banyak partai, susah mengambil keputusan, misalnya kebijaksanaan menaikkan BBM. Untuk 20 tahun ke depan, kita harus pahami dulu kondisi kita sekarang, seperti apa.
8. Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu sekarang;
 - a. Secara geografis mencakup kawasan yang luas, mungkin hampir sama dengan 1 provinsi di Jawa
 - b. Sarana dan prasarana belum memadai terutama jalan
 - c. Energi listrik belum memadai, tantangan utama bagi pengembangan industry
 - d. Kondisi ekonomi: indeks kesejahteraan ada di peringkat 8 di Provinsi Kalbar (Pendidikan, kesehatan, ekonomi)
 - e. Perkapita masih dibawah 10 juta/tahun
 - f. KH juga terletak di perbatasan Negara, sekarang diposisikan sebagai beranda, pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 nanti akan dibuka PLB (Pos Lintas Batas) di Badau. Merupakan tantangan tersendiri bagi pembanguna KH.
 - g. Pola ruang Kapuas Hulu juga merupakan tantangan karena lebih dari separo wilayah merupakan kawasan konservasi yang terdiri dari 2 taman nasional dan beberapa kawasan lindung(di bawah kewenangan pemerintah pusat). Ini merupakan kendala pembangunan (kendala pola ruang).

- h. Kami sedang mengusulkan, sebatas mengusulkan supaya pemerintah pusat ‘mengeluarkan’ beberapa HL menjadi APL untuk budidaya
- i. Sekarang coba diangkat isu pariwisata/ekowisata. Tetapi bukan hal yang mudah, potensi sudah bagus tapi yang jadi masalah kok belum ada wisatawan yang datang, barang bagus yang beli itu ‘nisi’ (tidak ada)

Tentang apa yang dilakukan Colupsia, meski baru pada tataran konsep umum perencanaan, disambut baik untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah.

Tanggapan peserta:

Baco Maiwa (Anggota DPRD Fraksi PKS):

1. Perlu menggali masalah dan potensi daerah, kita sebenarnya tahu permasalahannya namun lebih sering tidak tahu bagaimana mengatasi masalah tersebut
2. Misalnya soal investasi, kami baru saja didatangi tamu terkait dengan masalah perkebunan kelapa sawit. Mengapa prosesnya terbalik, ada SK Bupati dulu kemudian sawit berjalan sementara sosialisasi dan persetujuan masyarakat sering belakangan. Dampak buruk buat investasi dan juga dampak buruk untuk masyarakat. Intinya perlu ada perbaikan proses perijinan.
3. Saya mengikuti terus proses PPA Colupsia, ini hasil dari masyarakat, skenario yang dihasilkan positif dan berguna, toh tidak membebani anggaran daerah
4. Pengalaman saya, DPRD itu dilibatkan oleh pemerintah ketika sudah ada masalah
5. Soal penetapan wilayah perkebunan kelapa sawit juga sering bermasalah di lapangan
6. Kasihan investor dan kasihan juga masyarakat
7. Masalahnya itu ada di kita (PEmda)

Suparman/Kepala Bappeda:

1. Untuk perijinan pertambangan Bappeda tidak dilibatkan, kalau sawit iya dilibatkan. Sawit penting, karena apalagi yang bisa meningkatkan kemajuan kabupaten Kapuas hulu? Saat ini yang paling tepat ya sawit ini
2. Memang ada dampak buruk, tetapi dampak positifnya juga banyak, sekarang ini investasi kelapa sawit memberikan kontribusi besar, dalam 3 tahun terakhir saja 2,3 trilyun menyumbangkan devisa daerah (???) , belum lagi ribuan peluang pekerjaan yang diciptakan
3. Perlu ada tim (pemda dan dewan) untuk memantau perkebunan dan pertambangan di lapangan

Baco Maiwa (Anggota DPRD Fraksi PKS):

1. Koordinasi belum maksimal antar instansi

2. Contoh kasus di Selimbau belum lama ini, pembukaan kelapa sawit sampai ke pinggir2 sungai, gambut, kawasan konservasi, untuk diingatkan, tapi sudah terlanjur dibuka.
3. Saran saya, pertegas koordinasi

Paulina (TNBK):

Sudah ada kegiatan ekowisata yang dikembangkan oleh TNKB (PHKA), di dusun Sadap, kerjasama dengan operator di Jakarta. Mungkin secara bersama-sama bisa kerja sama untuk pengembangan ekowisata. Wilayah 50 persen lebih kawasan konservasi, harus samakan pemahaman tentang apa itu konservasi, apakah konservasi itu menghambat pembangunan?

Hermas (WWF): Sudah ada RTRWK sampai tahun 2030, intinya pembangunan berkelanjutan, kawasan konservasi perlu dicari sinergi untuk ekowisata. Apa yang harus dilakukan? Sekarang Dinas Pariwisata sudah mengembangkan Festival Danau Sentarum dan Betung Kerihun. Kalau jumlah wisatawan menurut catatan kami sudah ada, tahun 2005 ada sekitar 68, tahun 2012 ada 187 wisatawan asing yang tercatat

Suparman/Kepala Bappeda: Kita welcome dengan konservasi, kita komitmen, tapi apa itu konservasi kontribusinya buat daerah harus dicari? Bukan hanya uang kontribusinya, tapi perhatikan daerah, jalan Negara misalnya.

Pak Luther (Tokoh Adat Badau): Saya dukung Pak Baco, di tempat saya, anggota Dewan tidak dilibatkan, memang kami menyita peralatan berat waktu itu. Aku minta pejabat di Kapuas Hulu untuk tinjau baik baik di lapangan. Masalah perkebunan sawit, ibarat mulut manis, seperti jualan obat. Pihak Bappeda belum pernah bertemu muka dengan masyarakat. Soal sawit itu susah kami mau cerita.! Pokok intinya anggota dewan juga tidak ada ketika ada masalah.

Sesi presentasi Colupsia Project oleh Bayuni Shantiko (lihat lampiran powerpoint presentasi)

1. Presentasi tentang tujuan proyek, kegiatan di lapangan, durasi dan capain selama ini
2. Presentasi tentang proses PPA di Kapuas Hulu

Beberapa tanggapan:

Ahmad Salafudin (Camat Badau) : Beberapa skenario yang dihasilkan mencerminka pandangan yang berbeda-beda. Setiap skenario ada tantangan yang berbeda-beda pula. Kalau sampai tahun 2030 apa tantangan yang akan terjadi? Perlu dicari tahu tantangan-tantangan tersebut. Perbedaan skenario juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan.

Rustam Usman (Camat Bunut): Sebagai tambahan, di Indonesia ini ada pemilu mulai dari tingkat presiden, gubernur sampai denga Bupati. Pemilu ini erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan di daerah (masalah politik). Untuk konteks Kapuas Hulu, dalam 20 tahun ke depan akan ada 4 kali pilkada. Sebetulnya perencanaan di Kapuas Hulu tidak

kalah dengan di pusat, tetapi bisa saja perencanaan itu sia-sia karena jika berganti Bupati atau pejabat berubah juga rencananya.

Bacok Maiwa (Anggota DPRD Fraksi PKS): Menanggapi hasil PPA. Saya ikut terus proses PPA sebelumnya, para peserta telah berdebat sengit selama proses PPA. Kita harus dorong perencanaan PEmda menggunakan cara pikir PPA ini toh tidak memerlukan biaya lagi karena sudah ada Colupsia project. Jika tidak dipakai tidak apa-apa juga tetapi mari kita berpikir ke depan.

Alex Rambonang (Kepala Dinas Pariwisata): Saya juga peserta PPA sebelumnya. Sesungguhnya kegiatan PPA ini ingin melihat gambaran seperti apa yang akan terjadi ke depan di Kapuas Hulu ini. Ini gambaran jangka panjang, 20 tahun ke depan. Ini Cuma ingin member gambaran bahwa 4 skenario itu bisa terjadi. Nampaknya skenario 1 (Langkah Serempak) yang paling ideal, tetapi penting untuk berdiskusi bagaimana mewujudkannya.

Suparman (KEpala Bappeda): terimakasih atas kegiatan PPA, kita mengharapkan ada rekomendasi dari kegiatan ini

Nur Rohman (BTNBK): Saya tidak ikut sebelumnya, Skenario ini merupakan suatu perencanaan ke depan dan perlu untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk skenario yang paling baik.

DISKUSI KELOMPOK

Peserta dibagi ke dalam 3 kelompok dengan tugas sebagai berikut:

1. Apakah ada skenario lain yang mungkin terjadi selain 4 skenario hasil PPA, jika ada skenario seperti apa?
2. Pilihlah 1 skenario yang anda inginkan terjadi
3. Diskusikan dan sebutkan
 1. langkah-langkah utama yang harus/bisa dilakukan untuk mewujudkan skenario yang diinginkan.
 2. Peran apa yang bisa **anda** berikan dalam langkah-langkah tersebut
4. Presentasikan hasil kelompok/pilih perwakilan kelompok untuk presentasi

PRESENTASI KELOMPOK

Kelompok 1

1. Tidak ada penambahan scenario (scenario 1,2,3, dan 4 sudah cukup)
2. Skenario yang dipilih adalah Skenario 1 (Langkah Serempak)
3. Langkah-langkah untuk mencapai Skenario 1
 - a. Peningkatan koordinasi stakeholder
 - b. Implementasi sesuai dengan hokum dan perundangan

- c. Penguatan hukum adat
 - d. Peningkatan SDM
 - i. Adanya Diklat untuk aparatur pemerintahan
 - ii. Diklat untuk masyarakat (Pokmas, Adat, dll)
 - e. Pengawasan oleh proyek/kegiatan harus ditingkatkan
4. Pembagian Peran

Masing-masing poin di atas (langkah-langkah) yang sebaiknya berperan ke depan adalah PEmda, Camat, TNBK, WWF, CoLUPSIA, Masyarakat, Adat.

Anggota Kelompok 1

1. Hermas RM (EEF)
2. L.Sawang
3. H.Albinus
4. Paulina
5. Johan
6. Rusli K
7. Agus
8. Nur Rohman
9. Bayu

Kelompok 2

1. Tidak ada scenario tambahan
2. Skenario yang dipilih adalah Skenario 1 (Langkah Serampak)
3. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai Skenario 1 adalah:
 - a. Situasi politik yang kondusif
 - b. Regulasi yang jelas
 - c. Transparansi
 - d. Akuntabel
 - e. Kemitraan dan pemberdayaan
 - f. Kelestarian lingkungan
 - g. Menjunjung tinggi kearifan lokal
 - h. Toleransi
 - i. Gotong royong
 - j. Penerapan teknologi
 - k. SDM yang memadai
 - l. Iklim investasi yang sehat
 - m. Stabilitas ekonomi yang memadai
 - n. Efisiensi
 - o. KESediaan energy yang murah
 - p. Etos kerja dan ketrampilan
 - q. Pengawasan

1. Koordinasi berbagai elemen/stakeholder
2. Perencanaan yang sistematis dan komprehensif
3. Aplikasi perencanaan yang tepat
4. Pengawasan
5. Evaluasi dan umpan balik.

Anggota kelompok 2:

1. Baharudin (Camat Jongkong)
2. Iwan Setiawan (Camat Hulu Gurung)
3. Yohanes Entungan
4. Baco Maiwa (DPRD)
5. Jailani (PT.SMART TBK)
6. Soiti Santoso (Camat Seberuang)
7. Afdal Yasir (BPP)
8. Rustam Usman (Camat Bunut Hilir)
9. Yohanes Telajan (Empanang)

KELOMPOK 3

Skenario bisa berbeda-beda untuk masing-masing kecamatan karena Potensi yang berbeda, SDM dan SDA berbeda, Adat istiadat berbeda.

Adanya kendala kebijakan (mengapa hanya pariwisata? Mengapa tidak potensi lain misalnya ikan, madu dan lainnya) khususnya untuk kawasan konservasi

Keempat scenario bisa semua terjadi ke depannya, atau bisa juga gabungan antara scenario 1 sampai 4

Sekarang skenario 2 sampai 3 sudah terjadi. Skenario 1 juga sudah terjadi hanya untuk lingkup yang lebih kecil, misalnya di level RT atau Dusun atau Desa

Skenario yang dipilih adalah Skenario 1 (Langkah Serampak)

Langkah-langkah yang diperlukan:

1. Rancang ulang peruntukan lahan!
2. Dinas Kehutanan (PEMDA) dan Kementrian Kehutanan (BTNBK, BTNDS) mendatangkan program, bukan hanya mengundang investor yang mencari lahan seperti perkebunan kelapa sawit
3. Pemilihan komoditas yang ramah lingkungan
4. Pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah ulayat (SDA)
5. Adanya komitmen semua kompone pelaku pembangunan (Pemda, DPRD, Masyarakat, Pengusaha)
6. Regulasi dari pusat sampai ke daerah tidaksaling bertentangan, regulasi harus konsisten

Peran apa yang bisa dilakukan:

1. Memperjuangkan 'social cost' untuk diperhitungkan dalam perencanaan pembanguana (perkebunan kelapa sawit), misalnya dampak perkebunan terhadap air bersih. Bukti menunjukkan di beberapa kecamatan (Silat Hulu, Silat Hilir, Empanang) sekarang penduduk mulai harus membeli air bersih karena air tercemar yang jika dihitung biaya untuk membeli air bersih bisa mencapai 3 kali lipat APBD Kapuas Hulu (informasi dari Pak H.Durus/Bappeda)
2. Memfasilitasi/mediasi antara masyarakat dengan pihak lain misalnya Pemda, Investor) (Camat)
3. Berperan dalam merevisi tata ruang (Bappeda)
4. Berperan sesuai dengan kapasitas
5. Inventarisasi potensi sumberdaya alam sebagai komoditas yang ramah lingkungan (Bappeda)
6. Memaksimalkan fungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang (Bappeda)

Anggota kelompok 3:

1. H.Durus (Bappeda)
2. Wiban Toko (Camat Kalis)
3. Jemayung (Camat Puring Kencana)
4. Gunawan (Camat Batang Lupar)
5. Bagung (Tanjung...)
6. Jamali (Dinas Perikanan)
7. Budi Prasetyo (Bappeda)
8. Yayan Indriatmoko (CIFOR/fasilitator)

Tanggapan peserta :

Tambahan dari kelompok 3 (Pak Durus/Bappeda): Perlu ada kajian dan pertimbangan atas 'social cost' dari proyek-proyek besar seperti perkebunan kelapa sawit baru kemudian ada rekomendasi apakah perusahaan tersebut diijinkan beroperasi atau tidak.

Pak Jaelani/PT.SMART. TBK : Lokakarya ini cukup strategis, kami dari PT.Smart Tbk sendiri punya 11 PT yang beroperasi di Kapuas Hulu dan kami memberikan kontribusi terutama pembangunan infrastruktur jalan dan penciptaan peluang pekerjaan. HGU kami hanya 30 tahun, setelah itu infrastruktur bisa dipakai oleh pemerintah dan masyarakat.

Nur Rohman/TNBK : Menyarankan supaya setelah lokakarya PPA ini ada kegiatan/proyek yang lebih spesifik, ada perencanaan spesifik.

Paulina/TNBK: Supaya project Colupsia juga sampai tahun 2030 mengawal dan memonitor proses perencanaan pembangunan Kapuas Hulu. Perlu adanya perencanaan mikro dan lembaga yang memantau proses implementasi perencanaan tersebut. Perlu adanya advokasi

di lembaga legislative dan perlu pendampingan supaya tidak ‘lari’ dari perencanaan yang sudah dibuat.

Durus/Bappeda: perlu mencari benang merah permasalahan yang ada (terkait dengan pembangunan di Kapuas Hulu). Perlunya menyepakati bersama untuk menyelesaikan program perencanaan, kita benahi bersama. Di Slat Hulu, program pemerintah amburadul, perkebunan kelapa sawit berdampak buruk terhadap ketersediaan air bersih di sana. Terkait erat dengan program Colupsia ini kita bisa tanggulangi bersama karena banyak program tanpa proses Amdal terlebih dahulu.

Iwan Setiawan (Camat Air Gurung): Skenario 1 (Langkah Serempak) agak pesimis.

Baco Maiwa (Anggota DPRD Fraksi PKS): tanggapan positif terhadap proses PPA. Tantangan bagaimana masuk ke dalam PERDA. Idealnya perencanaan harus berdasarkan pada penelitian ilmiah, contohnya di Pemda Malang memanfaatkan penelitian-penelitian ilmiah dari Unibraw, Jogja juga begitu.. Kapuas Hulu perlu merangkul lembaga-lembaga riset supaya tidak menjadi Negara ‘lobby’ (setiap keputusan/perencanaan hasil dari lobby politik).